

MUAROJAMBI BUKA KAWASAN TRANSMIGRASI DI HUTAN LINDUNG

Pemerintah Kabupaten Muarojambi membat 133,1 hektare lahan di kawasan Taman Hutan Raya Senami. Semula, lahan itu rencananya akan dijadikan kawasan permukiman untuk transmigran asal Blitar, Jawa Timur.

Muhammad Yamin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, mengatakan membangun permukiman di kawasan hutan lindung itu tidak disengaja. Dia mengaku tidak tahu bahwa daerah tersebut termasuk kawasan taman hutan raya. Statusnya baru jelas ketika proyek hampir selesai. "Ini akibat kekeliruan membaca peta," katanya kemarin.

Sejak Mei tahun lalu, pemerintah telah membangun 131 unit rumah di Desa Aur, Kecamatan Kumpeh, Muarojambi. Proyek ini menghabiskan anggaran belanja negara sekitar Rp 6,7 miliar, yang akhirnya terbuang percuma.

Yamin mengatakan pembangunan tidak akan diteruskan dan segera dipindahkan ke tempat lain. "Lokasinya tidak terlalu jauh dari Desa Aur," katanya. Dia juga akan meminta tanggung jawab kontraktor proyek, yaitu PT Gemilang Bangun Utama, untuk membangun kembali rumah baru bagi transmigran.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muarojambi Syaifuddin Anang meminta agar lokasi permukiman bagi transmigran segera dipindahkan. "Jika ternyata ada pihak yang bersalah, kami akan bertindak tegas," katanya.

Ketika dikonfirmasi masalah ini, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi Agus Priyanto menolak berkomentar. Dia beralasan kasus itu sudah ditangani polisi. "Tanyakan saja langsung ke pihak kepolisian," katanya.

Namun, Kepala Kepolisian Resor Muarojambi Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora menolak menjelaskan. Dia hanya mengatakan kasus pembabatan hutan lindung itu sudah dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Jambi. "Prosesnya sudah kami limpahkan ke Polda, tanya saja ke sana," katanya. Sementara itu, Kepala Humas Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Syamsudin Lubis mengatakan belum mengetahui masalah ini. "Saya belum mendapat laporan tentang hal itu," katanya kemarin.

Selain pemerintah daerah, sebuah perusahaan (PT Makin Group) juga dituding membuka perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi. Agus mengatakan kasus itu sedang diselidiki oleh Departemen Kehutanan.

Sumber *Tempo* membisikkan bahwa lahan yang sudah digarap oleh anak perusahaan PT Gudang Garam itu adalah 1.500 hektare dari 33 ribu hektare hutan produksi di sana. Namun, menurut Agus, pihaknya belum bisa memastikan luas hutan yang sudah dibabat.

Hutan itu adalah bekas lahan hak pengusaha hutan milik PT Rimba Kahuripan Indonesia. Kini di atas lahan itu ditumbuhi pohon sawit siap panen. Juru bicara PT Makin Group Fradoko, ketika dikonfirmasi masalah ini, mengatakan pembukaan lahan di kawasan itu sudah seizin Bupati Muarojambi. **SYAIPUL BAKHORI**